

2023

JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH

P - ISSN 2087-9776

E - ISSN 2715-3134

JAM

Vol. 13 No. 1

Edisi: Januari – Juni 2023



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

1. PENGARUH *ONLINE SHOP* PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN INTENSITAS PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
Seri Murni & Delia Desrita
2. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH DAUD BEUREUEH 2
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Nevi Hasnita & Binti Mas Pelin
3. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUKFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020
Hendri Mauliansyah, Zulkifli Umar, Ermad MJ & Awil Fata
4. DAMPAK PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN OPERASI TERHADAP LABA USAHA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Fitri Yunina, Cut Fitrika Syawalina, Eva Susanti & Rifal Vauzi
5. PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PLTD LUENG BATA DI BANDA ACEH TAHUN 2022
Maidar, Surya Fatma & Tengku Taufiq
6. PENGARUH LIKUIDITAS, *DEBT TO EQUITY RATIO* DAN *EARNING PER SHARE* TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020
Syamsidar, Rusnaldi & Okta Adinda
7. PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN UTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021
Elviza, Mulyadi AR & Arifma Retzha Wiranda
8. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PIDIE
Intan Rizkia Chudri, Irmawati & Cut Atika Suri
9. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *INCOME STATEMENT APPROACH* DAN *VALUE ADDED STATEMENT* PADA PT. TRANSPORTER FEDERAL INDONESIA
Emmi Suryani Nasution, Desi Purnama Sari & Ricka Elviani
10. ANALISIS DETERMINAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI ACEH
Surna Latri & Vhaiz Indal Akbar

JAM

VOLUME 13

NOMOR 1

HALAMAN
1 - 136

BANDA ACEH
2023

P-ISSN 2087-9776
E-ISSN 2715-3134

DEWAN REDAKSI

PEMBINA

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Para Wakil Rektor Unmuha
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha

Penanggungjawab:

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh

Ketua Penyunting:

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak., CA.

Wakil Ketua Penyunting:

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA.

Penyunting Pelaksana:

1. **Dr. Dwi Cahyono, M.Si.. Akt.** (Univ. Muhammadiyah Jember)
2. **Dr. Ramli Gadeng, M.Pd.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
3. **Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
4. **Dr. Sri Suyanta, M.Ag.** (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
5. **Taufik A Rahim, SE., M.Si., Ph.D.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)
6. **Drs.Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.. MM.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)

Staf Pelaksana

1. Editor : **Irmawati, SE., M.Si., Ak.**
2. Adm.& Keuangan : **Rusnaidi, SE., M.Si.**
3. Distribusi & Pemasaran : **Elviza, SE.. M.Si.**
4. Pengelola IT : **Devi Kumala, S.Si., M.Si.**

Diterbitkan oleh:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Jl. Muhammadiyah No. 91 Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata – Kota Banda Aceh

SEKAPUR SIRIH

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Eksistensi dan identitas sebuah Universitas dapat diukur dan dipahami dari kreasi ilmiah dari setiap elemen di universitas tersebut. Makin banyak dan berbobot karya ilmiah yang dihasilkan, makin tinggi pula eksistensi, pemahaman dan penghargaan orang terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Kreasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah sebagai alat komunikasi efektif dengan Stakeholder.

Salah satu kreasi ilmiah yang akan menjadi barometer bagi eksistensi, pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah universitas adalah publikasi ilmiah baik yang dipublikasikan di berbagai jurnal maupun dalam bentuk *text book* yang dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan siapapun yang berminat untuk memahami suatu fenomena ilmiah yang ditulis oleh civitas akademika universitas tersebut.

Berdasarkan perspektif inilah dan ditengah kelangkaan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh melahirkan karya ilmiah berupa dalam bentuk Jurnal yang bernama Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), kami amat apresiatif kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Tim Redaksi dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mampu melahirkan salah satu karya yang cukup penting dalam rangka memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan wawasan para staf pengajar dalam penelitian-penelitian ke depan. Jurnal ini, disamping memperkaya khazanah keilmuan juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam studi ilmu akuntansi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Aceh akan tetapi juga diseluruh Universitas di Indonesia dan di luar negeri.

Rektor

Dr. Aslam Nur., M.A

SEKAPUR SIRIH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama sekali tidak henti-hentinya secara tulus kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua sehingga dapat berbuat sesuatu yang selalu mendapat bimbingan sepenuhnya dari Allah SWT. Selanjutnya selawat beiring salam khusus kita persembahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar dan mendidik ummat manusia sehingga mampu membuka mata hati kita semua dalam melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada Tahun 1991 Fakultas Ekonomi didirikan melalui melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0230/1991 tanggal 29 April 1991 terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan terakhir perpanjangan Izin Operasional Program Studi Akuntansi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1630/D/T/K-I/2009 Tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 Program Studi Akuntansi memperoleh hasil akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Studi Akuntansi membuat suatu program pengembangan penelitian staf pengajar/dosen dalam bentuk jurnal yang dinamakan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) dengan nomor P.ISSN 2087-9776 dan E.ISSN 2715-3134 yang dikeluarkan oleh PDII-LIPI serta diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dalam rangka penerbitan Jurnal ini, kami selalu membuka diri untuk menerima tulisan-tulisan bermutu, guna dapat kami muat dalam penerbitan-penerbitan berikutnya. Selaku Dekan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengelola dan semua penulis yang telah menyumbangkan karya terbaiknya di jurnal ini sehingga Jurnal Akuntansi volume 13 no.1 Edisi Januari-Juni 2023 ini bisa terbit sebagai kelanjutan dari edisi sebelumnya. Diharapkan terbitan selanjutnya rekan-rekan dari perguruan tinggi Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi se-Indonesia agar dapat menyumbangkan hasil karyanya untuk dapat dimuat pada Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Semoga karya para penulis semuanya menjadi ilmu yang menginspirasi kebaikan dan kemanfaatan di dunia ilmu akuntansi.

Sebagai penghargaan perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengelola Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) yang telah bekerja keras melakukan semua proses penerbitan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh, sehingga jurnal ini tampil dalam bentuk dan isi yang berkualitas. Dan akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita mampu menerbitkan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh dengan sebaik-baiknya.

Dekan

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM.

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Sekapur Sirih Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh	ii
Sekapur Sirih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh	iii
Daftar Isi	iv
Pedoman Penulisan	v

Jurnal

1. PENGARUH <i>ONLINE SHOP</i> PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN INTENSITAS PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) <i>Seri Murni & Delia Desrita</i>	1-14
2. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH DAUD BEUREUEH 2 <i>Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Nevi Hasnita & Binti Mas Pelin</i>	15-30
3. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUKFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020 <i>Hendri Mauliansyah, Zulkifli Umar, Ermad MJ & Awil Fata</i>	31-46
4. DAMPAK PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN OPERASI TERHADAP LABA USAHA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Fitri Yunina, Cut Fitrika Syawalina, Eva Susanti & Rifal Vauzi</i>	47-60
5. PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PLTD LUENG BATA DI BANDA ACEH TAHUN 2022 <i>Maidar, Surya Fatma & Tengku Taufiq</i>	61-70
6. PENGARUH LIKUIDITAS, <i>DEBT TO EQUITY RATIO</i> DAN <i>EARNING PER SHARE</i> TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020 <i>Syamsidar, Rusnaldi & Okta Adinda</i>	71-84
7. PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN UTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 <i>Elviza, Mulyadi AR & Arifma Retzha Wiranda</i>	85-96
8. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PIDIE <i>Intan Rizkia Chudri, Irmawati & Cut Atika Suri</i>	97-106
9. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN <i>INCOME STATEMENT APPROACH</i> DAN <i>VALUE ADDED STATEMENT</i> PADA PT. TRANSPORTER FEDERAL INDONESIA <i>Emmi Suryani Nasution, Desi Purnama Sari & Ricka Elviani</i>	107-120
10. ANALISIS DETERMINAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI ACEH <i>Surna Lastri & Vhaiz Indal Akbar</i>	121-136

METODE PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*Research Paper*) atau artikel ulasan (*Review*) dan resensi buku (*Book Review*), baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e_mail: jurnalfeunmuha@yahoo.com.

FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom kecuali abstrak. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (*print out*) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci (*key word*) maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan

II. PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

III. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku dirensensi.

Sumber Kutipan

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*bodynote atau sidenote*).
2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas.

**ANALISIS DETERMINAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI ACEH**

Surna Lastri¹, Vhaiz Indal Akbar²

¹*Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unviersitas Muhamamdiyah Aceh*

²*Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh*

E-mail : surna.lastri@unmuha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Populasi penelitian meliputi seluruh jumlah Pendapatan Pajak Daerah di Provinsi Aceh, yaitu PPKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan PAD dari tahun 2017-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Namun, pajak air permukaan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, ketika semua variabel pajak tersebut diuji secara simultan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh pada Periode 2017-2019.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.*

**ANALYSIS OF DETERMINANTS OF LOCAL TAXES ON
REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN
ACEH PROVINCE.**

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of Local Taxes, such as Vehicle Tax (PPKB), Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), Vehicle Fuel Tax (PBBKB), and Surface Water Tax (PAP), on Regional Original Revenue (PAD) in the Aceh Province. The data used in this study are secondary data obtained from the office of the Aceh Financial Management Agency (BPKA). The population of the study includes the total amount of local tax revenue in the Aceh Province, including PPKB, BBNKB, PBBKB, PAP, and PAD from the years 2017 to 2019. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. The results of the study show that, partially, The Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee and Vehicle Fuel Tax have a positive and significant influence on the regional original revenue in the Aceh Province. However, the Surface Water Tax does not have a positive and significant influence on the regional original revenue. Nevertheless, when all the tax variables, namely The Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Vehicle Fuel Tax and Surface Water Tax, are tested simultaneously, there is a positive and significant influence on the regional original revenue in the Aceh Province during the Period of 2017-2019.

Keywords : *Local Taxes, Regional Original Revenue, Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Vehicle Fuel Tax, and Surface Water Tax.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil perolehan pajak daerah, hasil perolehan retribusi daerah dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain-lain dari hasil pendapatan daerah yang sah. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau organisasi kepada negara sesuai dengan aturan hukum yang mengikat, tanpa adanya pengembalian secara langsung. Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah pusat, serta pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang juga dikenal sebagai pajak daerah (Karina dan Budiarmo, 2016).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi disuatu daerah, daerah tersebut diberi wewenang untuk mengatur keuangan mereka sendiri, termasuk mencari sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah tersebut, yang disebut sebagai pendapatan asli daerah (P. Rizqy Ramadhan, 2019). Melalui pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi memperoleh keuntungan dengan diberikan kewenangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi di daerah tersebut. Hal ini berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai langkah dalam mewujudkan desentralisasi (J. F. Ishak, Sari, Dwitayanti, and H. A. Mauluddi, 2021).

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan

bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak, Karina dan Budiarmo, (2016).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai PAD, hasilnya ditemukan bahwa pajak daerah terbukti memiliki kriteria positif terhadap PAD, dimana peningkatan kontribusi pajak daerah berdampak positif pada peningkatan PAD (R. F. Meinanda and A. Y. Larassati, 2021). Hasil penelitian lain terkait dengan pajak daerah menunjukkan bahwa PKB, BBNKB dan PAP berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Agustina, Ruslinda dan Arliani, Rina, 2015); (Fitria, 2019); (Salsabila dkk, 2022).

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi PAD pada Pemerintah Provinsi di Indonesia akan diteliti, berdasarkan *research gap* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat praktis dengan membantu pengambil keputusan di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengelolaan PAD.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai PAD terkait dengan pajak daerah (P. Rizqy Ramadhan, 2019); (R. F. Meinanda dan A. Y. Larassati, 2021); (L. Anasta and N. Nengsih, 2019); (R. Usman, 2017). Dalam penelitian tersebut mereka mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauhmana kebijakan daerah dan faktor kontribusi lainnya terhadap PAD melalui pajak. Penelitian tentang PAD ini juga dapat memberikan pemahan yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan perpajakan, potensi pendapatan serta strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan dalam serta memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui pajak.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri. Penerimaan ini dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dievaluasi sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri. Semakin besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan daerah mencakup semua sumber pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan berbagai jenis pendapatan daerah yang sah, termasuk pendanaan yang diterima melalui transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah ini didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada didaerah (E. Piterdono, 2017).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang penting dalam sistem perpajakan. Pungutan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, transportasi, serta kepentingan umum lainnya. Besaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan pemilik kendaraan wajib membayar pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi acuan utama dalam pengenaan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai jenis kendaraan yang terkena pajak, tarif pajak, kewajiban pembayaran, serta mekanisme administrasi dan penegakan hukum terkait pajak kendaraan bermotor.

Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor

sebagai hasil dari perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kendaraan ke dalam badan usaha.

Pajak ini berlaku di wilayah Aceh. Pendefinisian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga serupa dengan Qanun Aceh tersebut. Pajak ini dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan yang terjadi sebagai akibat dari perjanjian dua pihak, perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kendaraan ke dalam badan usaha.

BBNKB merupakan salah satu komponen pajak kendaraan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan saat melakukan peralihan hak kepemilikan. Pungutan pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang berkaitan dengan sektor transportasi dan infrastruktur. BBNKB mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 27 Tahun 1959. Pungutan ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Implementasi BBNKB dilakukan sebagai respons terhadap adanya gejala spekulasi objek, yaitu kendaraan bermotor, oleh para pedagang kendaraan bermotor. Gejala spekulasi objek kendaraan bermotor oleh pedagang kendaraan bermotor menjadi alasan utama diberlakukannya pungutan ini. Hal ini dapat mengacu pada praktik dimana pedagang memanfaatkan perubahan kepemilikan kendaraan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Penerapan BBNKB bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan spekulasi tersebut dengan memungut pajak atas setiap peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor (Samudra, 2015).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

Pungutan PBBKB berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah setempat. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pajak dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

Definisi PBBKB dalam Peraturan Daerah dan Undang-Undang tersebut memiliki persamaan yaitu bahwa pajak ini terkait dengan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Namun, perbedaan muncul dalam penjelasan lebih lanjut mengenai objek pajak, yaitu disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah, dan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dalam Undang-Undang.

Pungutan PBBKB bertujuan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan di sektor transportasi, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Tarif dan mekanisme pembayaran PBBKB diatur oleh peraturan daerah setempat, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Air Permukaan (PAP)

Awalnya, Pajak Air Permukaan (PAP) ini disebut pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan tujuan untuk memungut pajak daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Namun, berdasarkan undang-undang yang baru, pajak tersebut kemudian fokus pada objek pajak air permukaan, dimana akan dikenakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, pajak air permukaan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan merujuk pada semua jenis air yang terdapat pada permukaan tanah, kecuali air laut, baik itu berada dilaut maupun didarat.

Pungutan pajak ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dari penggunaan dan pemanfaatan air permukaan. Pendapatan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, konservasi lingkungan, dan pengembangan infrastruktur terkait air.

Ketentuan mengenai tarif dan mekanisme pembayaran pajak air permukaan diatur dalam

Peraturan Daerah setempat, seperti Perda Nomor 08 Tahun 2011. Peraturan tersebut menjelaskan rincian mengenai objek pajak, prosedur pembayaran, serta ketentuan administratif lainnya yang berkaitan dengan pajak air permukaan.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PKB memiliki peran yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini terlihat adanya kecenderungan di beberapa daerah untuk mendorong penduduk setempat agar membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya sendiri atau membaliknamakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya. Tujuan dari langkah ini adalah agar pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut dapat masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. (Samudra, 2015: 91).

Dengan mendorong penduduk setempat untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya sendiri, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan PKB yang akan berkontribusi pada PAD. Pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut akan langsung masuk ke kas daerah dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD (Anggraini, Arisman, dan Yunita, 2016); (Juliantika dan Rahardjo, 2016); (Karina dan Budiarmo, 2016); (Wijaya, Raharjo, dan Andini, 2016); (Agustina dan Arliani, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₁ : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu potensial sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan hasil dari pemungutan BBNKB, regulasi terkait telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan mengoptimalkan pemungutan BBNKB, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi sumber pendapatan ini untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan (Samudra, 2015: 110).

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantika dan Rahardjo (2016), Mokoginta (2015), Wahfar, Hamzah dan Syechalad (2014), Sari (2013), menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H₂ : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh.

3. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan, permintaan akan bahan bakar kendaraan bermotor juga meningkat.

Hal ini berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerapan PBBKB yang baik akan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak yang diperoleh dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi sumber pendapatan ini untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Samudra, 2015: 124).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016) menunjukkan bahwa PBBKB memiliki pengaruh terhadap PAD. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan PBBKB yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H₃ : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh.

4. Pengaruh Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Air Permukaan memiliki potensi pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan disuatu

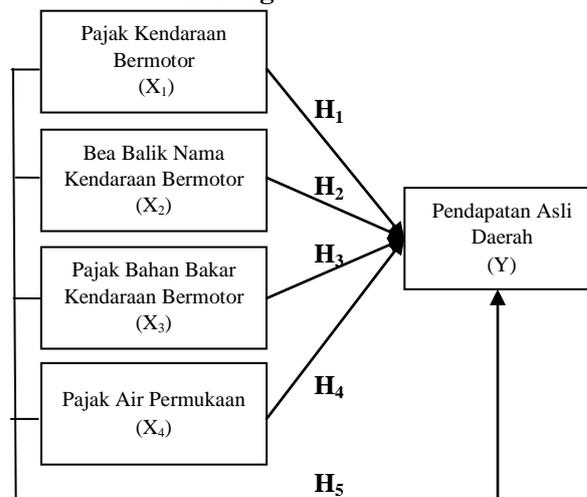
daerah. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah, penerimaan dari pajak ini dapat menjadi salah satu komponen yang signifikan. Dengan diterapkannya Pajak Air Permukaan yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Penerimaan ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat (Delima dkk, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhayati dan Irawan (2011:328); (Delima dkk, 2022), ditemukan bahwa Pajak Air Permukaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya, penerimaan pajak dari sektor pengambilan dan pemanfaatan air permukaan memberikan kontribusi yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah suatu wilayah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lina (2018:21) menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut peneliti tersebut, Pajak Air Permukaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemungutan pajak yang kurang efektif, rendahnya aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara pajak air permukaan dan pendapatan daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H_4 : Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi adalah mencakup seluruh unsur dari karakteristik observasi yang diamati Augustine dan Kristaung (2013:76). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak daerah dan PAD Provinsi Aceh periode tahun 2017-2019. Menurut (Augustine dan Kristaung, 2013:05), Sampel adalah sebuah pengamatan yang melalui beberapa proses dalam memilih bagian yang mendasari dari hal yang dimiliki populasi yang diamati tersebut.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan pemungutan PAD, PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP periode tahun 2017-2019. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu berupa data realisasi mengenai PAD, PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP di Provinsi Aceh.

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan program *Statistical Package for Sosial Science* (SPSS) Versi 2022 untuk dilakukan pengujian pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Model regresi menunjukkan arah hubungan antar variabel. Pengujian dugaan dapat menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial.

Sekaran, (2016) menyatakan bahwa uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan model regresi dilakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

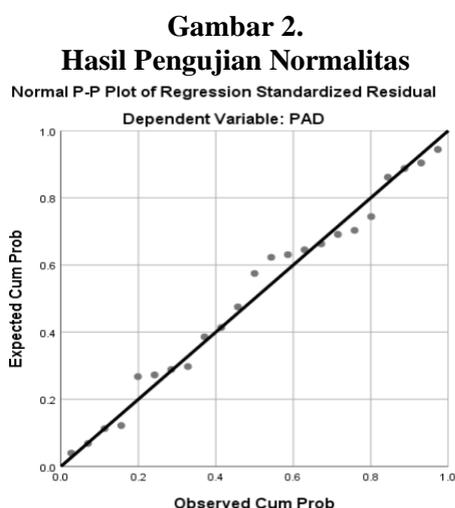
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan apakah model regresi yang akan digunakan memenuhi kriteria, diperlukan serangkaian pengujian yang meliputi :

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini secara praktis dapat dilakukan melalui pembuatan grafik normal probability plot. Grafik dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1 yang ditas, pola grafik menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat dua variabel independen yang memiliki korelasi yang kuat, maka ada indikasi adanya multikolinieritas pada variabel tersebut.

Tabel 1
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-425413064.403	1243266387.324		-.342	.736		
	PKB	.913	.138	.384	6.620	.000	.151	9.585
	BBNKB	1.181	.139	.418	8.521	.000	.171	3.991
	PBBKB	1.180	.151	.230	7.793	.000	.197	5.083
	PAP	-3.719	6.380	-.009	-.583	.567	.781	1.281

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan nilai VIF diketahui nilai VIF sebesar 9,585;3,991;5,083 dan 1,281 yang berarti kurang < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi dalam konteks model regresi linear digunakan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan dari asumsi klasik mengenai autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi.

Tabel 2
Hasil Uji Auto Korelasi

Model	Model Summary ^b		Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	R	R Square			
1	.998 ^a	.997	.996	2767660926.37	3.432
				761	

a. Predictors: (Constant), PBBKB, PAP, BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

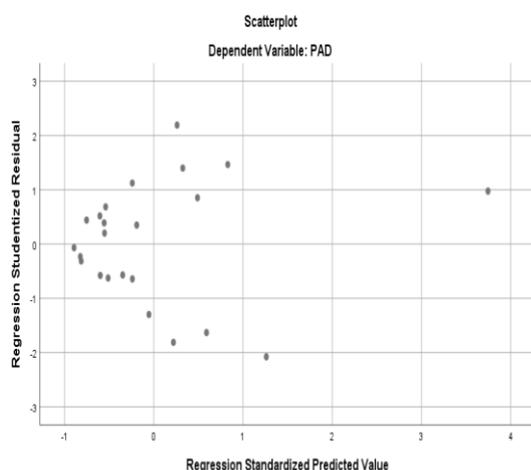
Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai Durbin Waston sebesar 3,432 yang berarti nilai di antara $d > 4 - dl$ dimana $dl = 0,9864$ dan $4 - dl = 3,0136$. Hal ini menunjukkan terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi adanya ketidak-samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah tahun 2022

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error				
1	(Constant)	-425413064.403	1243266387.324			
	PKB	.913	.138	.384	6.620	.000
	BBNKB	1.181	.139	.418	8.521	.000
	PBBKB	1.180	.151	.230	7.793	.000
	PAP	-3.719	6.380	-.009	-.583	.567

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah, 2022

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -4.2541 + 0.913 X_1 + 1.181 X_2 + 1.180 X_3 + 3.719 X_4 + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar **-4.2541** menyatakan bahwa jika nilai variabel PKB (X_1), BBNKB (X_2), PBBKB (X_3), dan PAP (X_4) dianggap nol (0) maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar **-4.2541**. Dengan kata lain bahwa pada saat variabel PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh sebesar **-4.2541** rupiah dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
2. Nilai koefisien regresi dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar **0.913** menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar **0.913**. Hal ini berarti apabila variabel independen Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar **0.913** rupiah.
3. Nilai koefisien regresi dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor **1.181** menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara

variabel Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar **1.181**. Hal ini berarti apabila variabel independen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar **1.181** rupiah.

4. Nilai koefisien regresi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar **1.180** menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar **1.180**. Hal ini berarti apabila variabel independen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X_3) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar **1.180** rupiah.
5. Nilai koefisien regresi dari Pajak Air Permukaan sebesar **3.719** menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pajak Air Permukaan (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar **3.719**. Hal ini berarti apabila variabel independen Pajak Air Permukaan (X_4) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar **3.719** rupiah.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan test signifikansi 0,05 dan untuk *degree of freedom* (df) = n-k

Tabel 4
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-425413064.403	1243266387.324		-.342	.736
	PKB	.913	.138	.384	6.620	.000
	BBNKB	1.181	.139	.418	8.521	.000
	PBBKB	1.180	.151	.230	7.793	.000
	PAP	-3.719	6.380	-.009	-.583	.567

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4 diatas, diperoleh t_{hitung} dari masing-masing variabel bebas. Selanjutnya t_{hitung} penelitian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df)=n-k, $10 - 3 = 7$ diperoleh $t_{tabel} = 1,895$. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) diperoleh $t_{hitung} 6,620 > t_{tabel} 1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini berarti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) diperoleh $t_{hitung} 8,521 > t_{tabel} 1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini berarti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X_3) diperoleh $t_{hitung} 7,793 > t_{tabel} 1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini berarti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Pajak Air Permukaan

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Air Permukaan (X_4) diperoleh $t_{hitung} -0,583 < t_{tabel} 1,895$. Sedangkan untuk signifikansi $0,567 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) tidak dapat diterima (ditolak). Hal ini berarti Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji F

Tabel 5
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4442377171370	4	1110594292842	1449,872	,000 ^b
		5280000000,00		6320000000,00		
	Residual	1378790460611	18	7659947003397		
		47640000,000		091300,000		
	Total	4456165075976	22			
		6425000000,00				
		0				

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PBBKB, PKB

Sumber : Data di olah tahun 2022

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa $F_{hitung} 1449,879 > F_{tabel} 4,737$ dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$, artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X_3) dan Pajak Air Permukaan (X_4) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

3. Koefisien Determinasi RSquare

Berikut ini tabel hasil koefisien determinasi antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,997	,996	2767660926,37756

a. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PBBKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data di olah tahun 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 6 diatas, diperoleh angka RSquare sebesar 0,997 atau 99,7%. Hal ini berarti 99,7% sumbangan pengaruh variabel independen yaitu PKB, PBBKB, BBNKN dan PAP terhadap PAD, sedangkan sisanya 0,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel lain yang mempengaruhi seperti Pajak Rokok

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Pada penelitian ini mendapatkan hasil analisis hipotesis (H_1) diterima, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil uji $t_{hitung} 6,620 > t_{tabel} 1,895$ dan nilai Sig t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Adanya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi aktif dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat terkait pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor. Langkah-langkah seperti pemutihan pajak, Samsat keliling, Gerai Samsat, Samsat *Drive-Thru*, E-Samsat dan lain-lain telah disediakan untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan.

Kemudahan yang disediakan tersebut telah berkontribusi pada peningkatan penerimaan penghasilan dari Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh setiap tahunnya. Bahkan, pendapatan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan meningkatnya pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh juga meningkat.

Dengan adanya peningkatan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Aceh dapat meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam mempermudah pembayaran pajak kendaraan telah memberikan dampak positif pada perekonomian dan keuangan daerah.

Dalam mendukung hal tersebut, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Natalia Ester Rompis et al. (2015), Margaretha Anggraini et al. (2015), Musdalifah (2020), Niken Anggraini (2020), Novia Larashati (2020), serta Djodi Setiawan dan Mia Isporima (2021). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Jumardi Amir (2015) yang menunjukkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yani Rizal dan Miftahul Hidayah (2018) juga

memberikan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan hasil penelitian yang menunjukkan variasi dalam pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, perlu lebih lanjut melakukan analisis dan studi yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Pada penelitian ini mendapatkan hasil analisis hipotesis (H_2) diterima, sehingga PBBNK berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil uji $t_{hitung} 8,521 > t_{tabel} 1,895$ dan nilai Sig t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Adanya pengaruh PBBNK terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Anggraini, dkk (2015) dan Novia Larashati (2020) yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan dari PBBNKB di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan terjadi peningkatan dan penurunan yang relatif kecil. Hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah adanya masyarakat yang membeli kendaraan

bekas namun tidak melakukan perubahan kepemilikan kendaraan tersebut.

Hal ini berkontribusi pada peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dari luar daerah. Selain itu, terdapat beberapa objek pungutan yang belum dapat terjangkau karena kendala peraturan yang tidak memungkinkan untuk memberlakukan pungutan terhadap objek pajak kendaraan bermotor dari luar daerah yang secara nyata telah dikuasai atau dimiliki dan beroperasi di wilayah Provinsi Aceh. Namun, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aliyah (2019) dan Niken Anggraini Pangesti (2020) yang memberikan hasil yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam konteks ini, terdapat variasi hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan dalam pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan studi lanjutan untuk memahami secara lebih komprehensif hubungan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

3. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Pada penelitian ini mendapatkan hasil analisis hipotesis (H_3) diterima, sehingga PBBKB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil uji $t_{hitung} 7,793 > t_{tabel} 1,895$ dan nilai Sig t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini

menunjukkan adanya pengaruh PBBNK terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini mendapatkan dukungan dari penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2020), yang menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riama Evi Aprianti (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti tingginya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor yang disebabkan oleh pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi.

Dalam konteks ini, penelitian Ferdiansyah (2020) memberikan pemahaman bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, perlu diingat bahwa hasil penelitian dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjut.

4. Pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak air permukaan merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Pada penelitian ini mendapatkan hasil analisis hipotesis (H_4) tidak diterima, sehingga PAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil $t_{hitung} -0,583 < t_{tabel} 1,895$ dan nilai Sig t sebesar 0,567 lebih besar dari 0,05. Tidak adanya pengaruh PAP terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini mendapatkan dukungan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lina (2018:21), yang menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Delima dkk. (2022) dan Suhayati dan Irawan (2011:328), yang menemukan bahwa variabel Pajak Air Permukaan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam konteks ini, terdapat variasi hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan dalam pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan konteks, metodologi penelitian atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang komprehensif untuk memahami hubungan antara Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah:

1. Meningkatkan pendataan dan identifikasi objek pajak. Diperlukan upaya untuk melakukan pendataan yang komprehensif terhadap objek pajak, termasuk kendaraan bermotor dan sumber pendapatan lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat teridentifikasi dengan baik.
2. Memperkuat pemungutan pajak. Dinas Pendapatan perlu memperkuat sistem pemungutan pajak dengan melibatkan teknologi yang memudahkan proses pembayaran dan pemantauan. Penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak: Perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Informasi yang jelas dan mudah diakses serta kampanye edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak.
4. Mengoptimalkan penegakan hukum perpajakan. Diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan. Hal ini akan memberikan sinyal yang kuat kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ruslinda. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Dinamika Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Maret.Vol.8. No.1, 83-98.
- Aliah, Nurul dkk. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Aceh. *E-Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*.
- Anggraini, Margaretha., Anton Arisman dan Christina Yunita. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP Palembang.
- Amir, Jumardi dkk. (2014). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Aziz Samudra, Azhari, (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Baldric, Siregar, (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Delima, Putri, Rismansyah, Nurmala. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi*, Vol. 4 No.2, Maret 2022 : 248-262. ISSN 2685-6530 E-ISSN 2722-5577
- Dwidiyanti, Salsabila, Ardiani, Susi, Fithri, Eka Jumarni (2022) Determinan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Vol 1 No 2 September 2022 ISSN: 2827-8542
- E. Piterdono, HZ, (2017). *Target dan Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2012-2016*. Bandar Lampung : BAPENDA.
- Evi Aprianti, Riama. (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Bandung
- Ferdiansyah, (2020), Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No. 2 Oktober 2020
- Fitria, (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Provinsi Aceh 2016-2018.
- J. F. Ishak, Y. P. Sari, Y. Dwitayanti, and H. A. Mauluddi. (2021). *The Determinant Factors of Capital Expenditure*. *Ilomata Int. J. Tax Account.*, Vol. 2, No. 2, pp. 158–165, 2021.
- Juliantika dan Rahardjo. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana
- Karina dan Budiarmo. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*. Maret. Vol 4. No.1. 715-722
- Larashati, Novia. (2021). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mokoginta, Nani Chairani. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Maret. Vol 3.No 1. 685-694
- Mujiyati dan Abdul Aris, (2017). *Inti Perpajakan Indonesia*". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Musdalifah.(2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah Gowa. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Pangesti, Niken Anggraeni. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Pancasakti Tegal.
- P. Rizqy Ramadhan (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. Program Studi Akuntansi Vol. 5, No. 1, pp. 81–87.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Permukaan.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- R. F. Meinanda and A. Y. Larassati (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*. Vol. 15, No. 2, pp. 536–551, 2021.
- Rizal, Yani dan Miftahul Hidayah. (2018). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9 (1), 84-91
- Rompis, Natalia Ester. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, Nomor 4
- R. Usman, (2017) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *JAF- Journal Account. Finance.*, vol. 1, no. 1, pp. 87–103.
- Ruslinda Agustina dan Rina Arliani, (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Periode 2003-2012.
- Sari, Tika Mustika. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Setiawan, Djodi dan Mia Isporima. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal JISIPOL*, Vol. 5, Nomor 3. Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung.
- Suhayati, E. (2011). Pengaruh Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Abt) Serta Air Permukaan (Aper) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 3(2), 303-330.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Wahfar, Rakhmad Rinaldi; Hamzah, Abubakar; Syechlad, Mohd Nur. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie”. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2014, 2.1.
- Wijaya, Kusuma, Budi., Raharjo, Kharis., Andini, Rita, (2016). “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2014)”. *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No.2 Maret 2016. Universitas Padjajaran.
- Widya Ningsih dan Anim Rahmayati, (2018). “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Periode 2015-2017”.